



**RANCANGAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KOTA TARAKAN TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta 'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025. Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2026 yang telah ditetapkan.

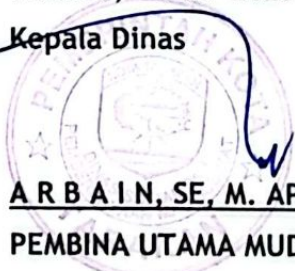
Berdasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana kerja perubahan dibuat hampir setiap tahun dengan mendasarkan pada rencana strategis, dan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sampai dengan bulan Maret 2025 atau di TW I, rencana kerja perubahan disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, dan kegiatan perubahan tahun 2025.

Kami telah mengoptimalkan seluruh kemampuan untuk menyajikan perubahan rencana kerja DINSOSPM Kota Tarakan tahun 2025 dengan baik, namun karena keterbatasan banyak hal, maka kami menyadari bahwa Rancangan Perubahan rencana kerja ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga rencana kerja perubahan ini bermanfaat dan menjadi bagian dari keinginan bersama untuk perbaikan berkelanjutan bagi DINSOSPM dan Pemerintah Kota Tarakan.

Tarakan, Juni 2025

Kepala Dinas



ARBA'IN, SE, M. AP

PEMBINA UTAMA MUDA / IVc

NIP. 19660616 199803 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat, dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

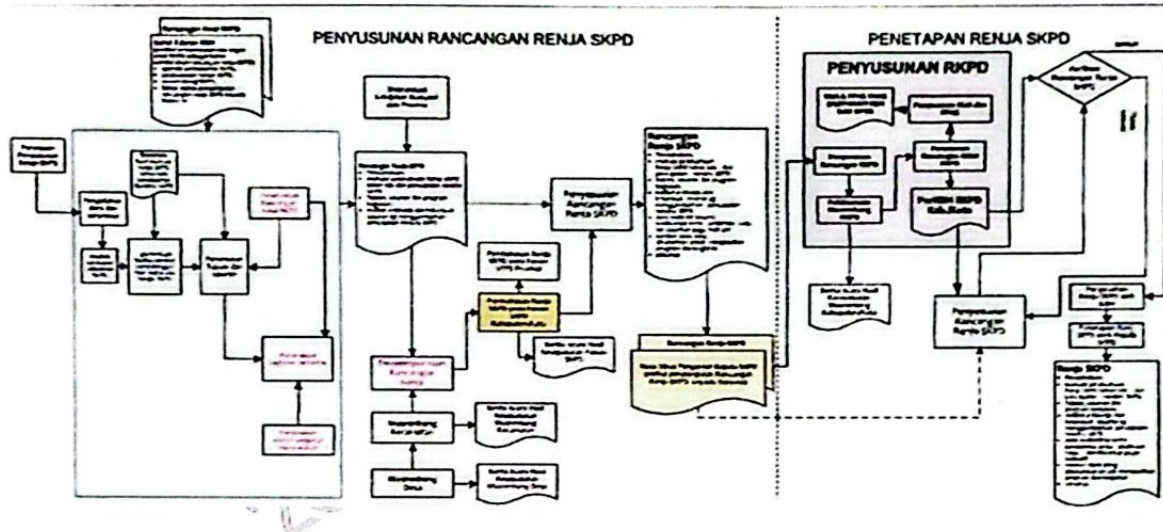
Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 - 2026, dimana tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun pertama dalam periode Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 - 2026 yang di arahkan sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada satu tahun anggaran berjalan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang telah di tetapkan.

Memperhatikan surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 000.7.2.2/1019/BAPPEDA LITBANG tanggal 02 Juli 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 bahwa Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, maka disusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan 2025.

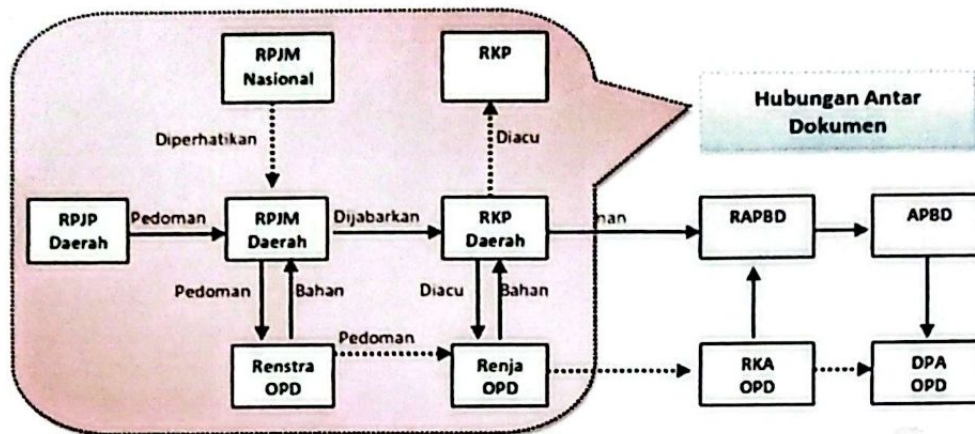
Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat disusun berdasarkan :

1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Rancangan Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk.II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menterei Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerinta Daerah tahun 2025
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri no 14 tahun 2024 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5/5889/2021 Tahun 2019 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.
29. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025.
30. Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-XII/545/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sehingga lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Adapun Maksud dari Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2025;
2. Untuk menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan Tujuan dari Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah:

1. Sebagai acuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2025, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024;
2. Menetapkan program dan kegiatan serta sub kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025;

3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan .
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA-P) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-P) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD-P Tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN 1

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan sampai dengan Triwulan 1 Tahun berjalan sebagaimana tabel Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah pada tabel 2.2

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

Menjelaskan rincian rencana-rencana kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan rincian anggaran untuk menunjang rencana-rencana kerja OPD.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TRIWULAN I TAHUN 2025.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan dan hasil rencana program dan kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sampai dengan triwulan I tahun berkenaan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat , serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2025, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan 8 (Delapan) Program, 15 (Lima belas) kegiatan dan 38 (Tiga puluh delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.600.756.328 dengan realisasi sampai dengan Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 857.947.045,- atau 11,29%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

TRIWULANI
at Daerah Dinas Sosial
Tarakan Tahun 2025

Lampiran 1 (Berkas 2025)																					
No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2025				Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Pengguna g-jawab
					K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
						7.600.759.448															
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WALUB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			600.182.182															
	1	06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			600.182.182															
				Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	51.551.580	44.416.700								-			Dinsos PM			
	1	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																		
				Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	124 Org	51.551.580	44.416.700								-	0,00%	0,00%	Kepala Bidang Sosial			
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124 Org	51.551.580	44.416.700	0	-	0	-	0	0	0	0	0,00%	0,00%	Sub Koordinator Pemerday aan Sosial dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan			
1		1	06	2.0 0001																	
	1	06	04															Dinsos PM			

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	2.000.000	1.980.000	0	-	0	-	0	0	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
22						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.000.000	1.980.000	0	-	0	-	0	0	0 Laporan	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
23						Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5.000.000	4.980.000	0	-	0	-	0	0	0 Dokumen	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.703.682.922	3.149.244.496								1.589.278.806	62,50 %	21,82 %	SEKRETARIS (DinasPw)
24						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang /bulan	3.641.522.922	3.087.188.496	312 Orang /bulan	808.299.686	0	-	0	0	312 Orang/ bulan	808.299.686	100%	22,20%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
25						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	62.160.000	62.056.000	1	-	0	-	0	0	2 Dokumen	15.722.000	25,00 %	0,00%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	1 Layanan	18.200.000	18.125.000									0,00%	0,00%	SEKRETARIS (DinasPw)
26						Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26 Paket	18.200.000	18.125.000	0	-	0	-	0	0	0 Paket	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	189.469.014	173.467.120								-	0,00%	0,00%	SEKRETARIS (DinasPw)
27						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.999.995	4.978.700	0	-	0	-	0	0	0 Paket	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

28	X	X	0	2.0	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	77.399,573	72.340,280	0	-	0	-	0	0	0	Paket	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan
29	X	X	0	2.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.530,646	23.750,640	0	-	0	-	0	0	0	Paket	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan
30	X	X	0	2.0	0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.000.000	6.000.000	0	-	0	-	0	0	0	Laporan	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan
31	X	X	0	2.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	65.538.800	66.397.500	0	-	0	-	0	0	0	Laporan	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan
32	X	X	0	2.0	0006	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	39 Unit	226.497.430	161.970.900	0	-	0	-	0	0	0	Unit	-	0,00%	0,00%	SEKRETARIS (DinasPMA)
33	X	X	0	2.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000	1.800.000	0	-	0	-	0	0	0	Laporan	-	0,00%	0,00%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan
34	X	X	0	2.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.900.000	101.900.000	3	23.585.059	0	-	0	0	0	Laporan	23.585.059	25,00%	23,15%	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawalaan
	X	X	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	59 Unit	109.267.580	158.853.630									39.914.060	47,50%	100,0%	SEKRETARIS (DinasPMA)

[illegible]

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 pada Triwulan I berdasarkan target Indikator Kinerja Program Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Sosial s/d Tw I sebesar 00,0%. Dengan dukungan kegiatan :

Pemberdayaan Sosial. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, Kendala yang dihadapi sub kegiatan ini, Kendala umum dalam pelaksanaan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat (Peksos) kewenangan Kabupaten/Kota antara lain adalah keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kurangnya kolaborasi antar pihak terkait, dan ketidaksesuaian perencanaan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi Peksos, serta kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan juga bisa menjadi kendala.

2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Rehabilitasi Sosial s/d Tw I sebesar 0,00%. Dengan dukungan kegiatan :

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan permakan dan alat bantu serta Reunifikasi keluarga masih dalam proses tergantung pada laporan pihak terkait dengan dilakukannya data verifikasi dan validasi data terhadap Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Kendala yang dihadapi seperti kegiatan reunifikasi anggaran yang direncanakan terkadang tidak sesuai dengan tujuan klien yang dilakukan reunifikasi/pemulangan ke keluarganya, termasuk permakanan bagi terlantar yang ditinggal di shelter belum tentu ada untuk ketersediaan.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

Adapun Capaian Realisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar 00,0%, Dengan dukungan kegiatan :

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana melalui kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan

Daerah Kabupaten/Kota, Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat data lapangan dan laporan pihak terkait dengan dilakukannya verifikasi dan validasi data terhadap fakir miskin dikota Tarakan. Kegiatan ini sesuai dengan angkas yang direncanakan pada triwulan berikutnya.

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Adapun Capaian Realisasi Program Penangan Bencana sebesar 12,42 % Dengan dukungan kegiatan :

Anggaran ini disediakan sebagai dana standby bila terjadi adanya bencana alam dan sosial berupa pemberian permakanaan bagi petugas di lapangan dan penyintas akibat adanya bencana. Sampai dengan triwulan ini kegiatan yang dilakukan sebatas pengambilan logistik kebencanaan dari provinsi.

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN

Adapun Capaian Realisasi Program Taman Makam Pahlawan sampai dengan Triwulan I sebesar 100 %

Bahwa dalam Kegiatan ini telah terlaksana pemeliharaan dan perawatan TMP secara berkala dengan hasil yang optimal dan tidak ada kendala sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

6. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Adapun Capaian Realisasi Program Administrasi Pemerintahan Desa terealisasi sebesar 0,00%.

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan kelurahan, fasilitas evaluasi perkembangan Desa serta lomba Desa dan Kelurahan belum terlaksana dengan optimal sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Adapun Capaian Realisasi Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terealisasi sebesar 0,00%,hingga saat ini.

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota berjalan sesuai rencana angkas pada Triwulan I

Permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan pelayanan adalah :

1. Keterbatasan jumlah tenaga Sumber Daya manusia mengakibatkan petugas merangkap lebih dari satu program kegiatan.
2. Peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia melalui diklat maupun workshop.
3. Keterbatasan anggaran program kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
5. Standar satuan harga yang ditetapkan dalam proses perencanaan dan penganggaran terlalu rendah belum mampu mengimbangi inflasi sehingga mempengaruhi proses pengadaan barang dan jasa.
6. Penetapan penggunaan anggaran reunifikasi/pemulangan keluarga sehingga pada saat adanya klien terlantar tidak sesuai dengan tujuan klien terlantar yang dipulangkan ke daerah asal.
7. Kegiatan program Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, adanya beberapa lembaga yang diberikan bantuan hibah seperti Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/LPM yang tidak aktif di kepengurusannya.
8. Penerapan aplikasi SIPD dalam proses penatausahaan keuangan masih terkendala aplikasi yang sering mengalami gangguan serta kurangnya sosialisasi dari kemendagri terkait operasionalisasi aplikasi dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW I Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya yang disebabkan adanya efesiensi anggaran (Refocusing Anggaran) dan adanya tambahan anggaran Belanja gaji PPPK Tahun 2025, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

Pengurangan Anggaran Sub Kegiatan :

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa

- 1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
- 2) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- 3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- 5) Pemberian Layanan Rujukan

- 6) Pemberian Layanan Rujukan
- 7) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
- 8) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- 9) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
- 10) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyediaan Makanan;
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2. HONORARIUM

- 1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

3. PENCETAKAN

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

- 1) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- 2) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;
- 3) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- 5) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;
- 6) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;
- 7) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota:
- 8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- 9) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota:
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

4. PENDUKUNG

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

- 1) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;
- 2) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

5. PENDUKUNG (MAMIN)

Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

1) Fasilitas Kunjungan Tamu;

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- 2) Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat/evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;**
- 3) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;**
- 4) Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan;**
- 5) Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;**
- 6) Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;**
- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;**
- 8) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial;**
- 9) Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;**
- 10) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;**
- 11) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota;**
- 12) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah;**

6. PENDUKUNG (PAKAIAN)

Belanja Pakaian Batik Tradisional

1) Pemberian Layanan Data dan Pengaduan;

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya;

Belanja Pakaian Olahraga

- 1) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;**
- 2) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota);**

7. PENDUKUNG (SARPRAS)

Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

***) Belanja Modal Peralatan Mini Computer**

8. SEREMONIAL

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

- 1) Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;**
 - 2) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial.**
- 9. Pemeliharaan Kendaraan Jabatan (BBM dan Service);**

10. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
11. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
12. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS;
13. Rasionalisasi harga laptop menjadi 15 jt per unit;

Penambahan Anggaran Sub Kegiatan :

1. Belanja Gaji PPPK;
2. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK (ULP);
3. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK (TPP)

Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (program 1 sampai dengan program 8) bahwa capaian fisik sebesar 33,46% sampai dengan 30 Juni 2025, sedangkan capaian keuangan sebesar 30,97 % terdapat deviasi antara realisasi fisik dan realisasi keuangan, sehingga perlu pencermatan dalam pelaksanaan bulan berikutnya, perlu penataan kembali baik target output di sub kegiatan maupun target anggaran pada tiap bulan agar mencapai target 100% di akhir tahun.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Keberhasilan kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2 Data Capaian SPM Dinas Sosial 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	63 org	10
2	Rehabiltasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	Jumlah Penyandang Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	35.99 %	100	100%	25 org	24
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah Penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	28 org	10
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Penyandang Gelandangan dan Penegemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti	0	100	100%	30 org	43
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100	100	100%	543 org	269

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap Tujuan dan sasaran Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Perumusan isu- isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota

Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Tersedianya kerangka regulasi yang mengatur masalah sosial dan kelembagaan masyarakat.
- b. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh aparatur untuk meningkatkan dan membuka akses peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tersedianya SDM dalam Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Kelemahan

- a. Belum optimalnya tentang upaya-upaya dalam peningkatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Belum optimalnya kinerja SDM Bidang Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.
- c. Masih terbatasnya sarana dan akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Peluang

- a. Adanya perkembangan teknologi informasi.
- b. Penambahan kelengkapan sarana dan prasarana teknologi informasi.
- c. Pembenahan pada sumber daya manusia dan jumlah personil yang terus ditingkatkan untuk dapat mendukung kebutuhan pembangunan di Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Ancaman

- a. Krisis ekonomi global yang berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat saat ini;
- b. Rusaknya ekosistem lingkungan hidup yang mengakibatkan bencana alam dan sosial;
- c. Tumpang tindihnya kebijakan pada program kebijakan daerah dan program dekonsentrasi;
- d. Menurunnya kesadaran serta kepedulian masyarakat dalam pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Review terhadap rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan

kinerja pencapaian target Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) .

Review terhadap rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dijabarkan pada Tabel 3 dibawah ini:

TABEL 3
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD (Rencana Kerja Daerah) Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				7.600.756.328	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat				8.227.475.769	
	URUSAN PEMERINTAHAN WALIS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.374.480.208					5.050.921.249	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	3.774.301.146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	4.528.170.807	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	3 Dokumen	8.940.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	3 Dokumen	7.560.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1.980.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dokumen	1.680.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.980.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.680.000	
3	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Tarakan	Jumlah dokumen hasil penyenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 Dokumen	4.980.000	Penyenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Tarakan	Jumlah dokumen hasil penyenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah	1 Dokumen	4.200.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.149.244.496	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	4 Layanan	3.998.009.212	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/Bulan	3.087.188.496	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarakan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	312 Orang/Bulan	3.935.953.212	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	62.056.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	62.056.000	

3	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah layanan Administrasi Kepegawain	1 Layanan	18.125.000	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah layanan Administrasi Kepegawain	1 Layanan		
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tarakan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tarakan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit		
7	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (kaos olahraga Jurnat)	Tarakan	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Layanan	-	Pengadaan Pakialan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (kaos olahraga Jurnat)	Tarakan	Jumlah Paket Pakialan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Layanan		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	173.467.120	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tarakan	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 Layanan	135.617.785	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.978.700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.978.700	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	72.340.280	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tarakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	66.324.380	
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	23.750.640	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	21.275.700	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	6.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tarakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	5.100.000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	66.397.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarakan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	37.939.005	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah aset/BMD yang disediakan	39 Jenis	161.970.900	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah aset/BMD yang disediakan	39 Jenis	158.556.100	
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	161.970.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	158.556.100	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	103.700.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	5 Layanan	103.700.000	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.800.000	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	101.900.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	59 Unit	158.853.630	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tarakan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	59 Unit	124.727.710	

16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipeliharakan dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	65.560.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipeliharakan dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	31.434.080	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharakan dan dibayarkan Pajak dan Pertinannya	8 Unit	78.023.630	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tarakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharakan dan dibayarkan Pajak dan Pertinannya	8 Unit	78.023.630	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharakan	40 Unit	15.270.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tarakan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipeliharakan	40 Unit	15.270.000	
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharakan/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tarakan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharakan/Direhabilitasi			
II	Program Pemberdayaan Sosial	Tarakan	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	44.416.700	Program Pemberdayaan Sosial	Tarakan	Persentase partisipasi PSKS yang memperoleh pembinaan, bimbingan dan pelatihan dalam menunjang pelaksanaan kesejahteraan sosial	100%	22.511.000	
8	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah pemberian izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	0 izin	-	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah pemberian izin sumbangan dan undian gratis berhadiah	0 izin	-	
20	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	0 Dokumen	-	
9	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	124 Orang	44.416.700	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial	124 Orang	22.511.000	
21	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124 Orang	44.416.700	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	124 Orang	22.511.000	
III	Program Rehabilitasi Sosial	Tarakan	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlanter serta gelandangan pengemis terlanter di luar pantri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	2.40.550.412	Program Rehabilitasi Sosial	Tarakan	Persentase penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlanter serta gelandangan pengemis terlanter di luar pantri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	217.410.012	
10	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantri Sosial	Tarakan	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlanter serta gelandangan pengemis terlanter di luar pantri yang di jangkau	335 Orang	236.636.992	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantri Sosial	Tarakan	Jumlah penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlanter serta gelandangan pengemis terlanter di luar pantri yang di jangkau	335 Orang	213.496.592	
22	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	49.925.000	Penyediaan Permakanan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	49.925.000	

23	Penyediaan sandang	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang	10 orang	7.935.000	Penyediaan sandang	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan sandang	10 orang	7.935.000	
24	Penyediaan Alat Bantu	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang	90.208.300	Penyediaan Alat Bantu	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	54 Orang	90.208.300	
25	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	41.953.180	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	29 Orang	23.910.580	
26	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tarakan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	9.930.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Tarakan	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	8.140.000	
27	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	26.775.612	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	26.775.612	
28	Pemberian Layanan Rujukan	Tarakan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	9.909.900	Pemberian Layanan Rujukan	Tarakan	Jumlah orang yang mendapatkan Layanan Rujukan kewenangan Kabupaten/Kota	14 Orang	6.602.100	
11	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Tarakan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	3.913.420	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial	Tarakan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen	3.913.420	
29	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	3.913.420	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	3.913.420	
IV	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tarakan	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	100%	141.126.420	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Tarakan	Persentase perlindungan dan jaminan sosial yang dilayani	100%	113.676.500	
12	Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	10531 KPM	141.126.420	Pengelolaan Data Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Data fakir miskin yang di muktahirkan	10531 KPM	113.676.500	
30	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2022 Orang	71.199.300	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	2022 Orang	59.390.400	
31	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3447 Keluarga	49.977.820	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	3447 Keluarga	40.178.600	
32	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tarakan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5062 Orang	19.949.300	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Tarakan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	5062 Orang	14.107.500	

33	Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Tarakan	Jumlah dokumen kebijakan daerah yang di tetapkan	1 Dokumen	-	Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP	Tarakan	Jumlah dokumen kebijakan daerah yang di tetapkan	1 Dokumen	-
34	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Tarakan	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	1 Dokumen	-	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Tarakan	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	1 Dokumen	-
V	Program Penanganan Bencana	Tarakan	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100%	49.939.800	Program Penanganan Bencana	Tarakan	Persentase layanan penanganan bencana alam dan sosial	100%	45.457.200
13	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tarakan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	49.939.800	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Tarakan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	100%	45.457.200
35	Penyediaan Makanan	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	49.939.800	Penyediaan Makanan	Tarakan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	298 Orang	45.457.200
VI	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Tarakan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	124.145.730	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Tarakan	Persentase layanan pengelolaan taman makam pahlawan	100%	123.695.730
14	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	124.145.730	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	1 TMP	123.695.730
36	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	124.145.730	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	123.695.730
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.126.276.120	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				3.176.554.520
VII	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tarakan	Kategori kelurahan	Cepat Berkembang	61.087.100	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Tarakan	Kategori kelurahan	Cepat Berkembang	68.166.900
15	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tarakan	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	61.087.100	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Tarakan	Jumlah Pembinaan Kelurahan	20 Kelurahan	68.166.900
37	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	61.087.100	Facilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	68.166.900
VIII	Program Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	3.165.189.020	Program Pemberdayaan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	Persentase lembaga masyarakat yang aktif	100%	3.108.387.620

16	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	3.165.189.020	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tarakan	Jumlah lembaga/organisasi masyarakat yang Aktif	76 Lembaga	3.108.387.620	
38	Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Lembaga Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	486.641.500	Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan Lembaga Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	76 Lembaga	435.153.400	
39	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	1.474.989.040	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tarakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Unit	1.474.989.040	
40	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	36.000.000	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	28.702.600	
41	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	67.558.480	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Tarakan	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	69.542.580	
42	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	1.100.000.000	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Tarakan	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	25 Dokumen	1.100.000.000	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT .

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tidak ada usulan baik dari masyarakat melalui musrenbang maupun melalui pokok- pokok pikiran DPRD sehingga tidak ada penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

DAFTAR USULAN (ASPIRASI) MASYARAKAT DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKA TAHUN 2025

No	Program kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Besaran volume	Pagu (Rp)	Catatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					
1	Rehab Posyandu Pandan Wangi	RT. 14 Kelurahan Selumit Pantai		1 bangunan	200,000,000	Di Akomodir
2	Rehab Posyandu	RT. 12 Kelurahan Kampung 1 Skip		1 Bangunan	200,000,000	Di Akomodir

BAB III

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 RENCANA KERJA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Renja ini disusun berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2025. Rancangan Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

4.2 PENDANAAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2025 di dukung oleh pendanaan yaitu dari anggaran APBD Kota Tarakan Tahun 2025.

Hasil Perumusan Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan dalam tabel 4 sebagai berikut :

MASYARAKAT TAHUN 2025

[illegible]

[illegible]

		Jumlah Paket Bawang Cebakan dan Pengendalian yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35.530.046,00	23.750.840,00	21.275.700,00	-14.254.940,00	Kota Tarakan, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	35.530.046,00	DINAS SOSIAL DAN PEMERIKAAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.06.0006	Festival Kunjungan Temu															
		Jumlah Laporan Festival Kunjungan Temu	4 Laporan	4 Laporan	0.000.000,00	0.000.000,00	5.100.000,00	900.000,00	Kota Tarakan, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	0.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMERIKAAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.06.0009	Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
		Jumlah Laporan Pengembangan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	20 Laporan	65.538.800,00	60.387.500,00	37.833.005,00	-27.599.795,00	Kota Tarakan, Semau Kecamatan, Semau Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	65.538.800,00	DINAS SOSIAL DAN PEMERIKAAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.07	Pengadaan Bawang Makk Daerah Pemungutan Urutan Pemerintah Daerah															
			-	-	228.487.430,00	161.970.800,00	158.556.100,00	-67.941.330,00			-	-	-	-	64.787.430,00	DINAS SOSIAL DAN PEMERIKAAAN MASYARAKAT
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya															
		Jumlah Unit Perawatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	39 Unit	39 Unit	228.487.430,00	161.970.800,00	158.556.100,00	-67.941.330,00		DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-	-	64.787.430,00	DINAS SOSIAL DAN PEMERIKAAAN MASYARAKAT

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJOK PENDANAAN										KELompok Sasaran	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2023		PAUJ INOKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY NABIONAL DAEKHA M	TARGET		PAUJ INOKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SEDUDAH	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD PERUBAHAN 2023	Berkas/Berita rang (1b-12)									
																			8		9
1	2	3	4	5	6	7															
1.06.01.2.06		Pengadaan Jasa Penyung Jalan Perumahan Daerah							103.700.000,00	103.700.000,00	103.700.000,00	0,00						103.700.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.06.01.2.06.0001		Pengadaan Jasa Surti Menyort																			
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Surti Menyort	1 Laporan	1 Laporan		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						1.800.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.06.01.2.06.0002		Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, yang Diperoleh	12 Laporan	12 Laporan		101.800.000,00	101.800.000,00	101.800.000,00	0,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						101.800.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.06.01.2.06		Pemeliharaan Barang Mula Dasar Penyung Urutan, Perawatan Daerah							109.267.580,00	156.853.030,00	124.727.710,00	15.460.130,00						109.267.580,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.06.01.2.06.0001		Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diperoleh dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit		3.000.000,00	86.560.000,00	31.434.080,00	28.434.080,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAWA KENDARAAN BEROTOR (BANKS)						3.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.06.01.2.06.0002		Pengadaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Diperoleh dan dibayarkan Pajak dan Perawatannya	8 Unit	8 Unit		86.330.580,00	78.023.630,00	78.023.630,00	43.315.060,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	OPSEN BEA BALIK NAWA KENDARAAN BEROTOR (BANKS)						86.330.580,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
1.06.01.2.06.0006		Pemeliharaan Prastasi dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Prastasi dan Mesin Lainnya yang Diperoleh	40 Unit	40 Unit		19.900.000,00	15.270.000,00	15.270.000,00	4.638.000,00	Kota Tarakan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)						19.910.000,00	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
2	1.06.02	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL	Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam menyusun kebijakan kegiatan sosial	100 %	100 %		51.351.580,00	44.416.700,00	22.311.000,00	0,00								51.351.580,00			

1,06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota									51.551.590,00	44.416.700,00	22.511.000,00	-29.040.590,00						51.551.590,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT
1,06.02.2.03.0001	Pengembangan Kemampuan Potensi Pahlawan Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota																			
		Jumlah Orang Menerima Pembebasan: Kapasitas Pahlawan Sosial Masyarakat Kecamatan Kabupaten/Kota	124 Orang	124 Orang	51.551.590,00	44.416.700,00	22.511.000,00	-29.040.590,00	Kota Tawarkan, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)								51.551.590,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT	
1,06.04	PROGRAM RENOVASI SOSIAL	Penerapan penyandang disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia berumur serta pelayanan pengasuhan terpadu di luar rumah yang berpusat pada kebutuhan dasarnya	100 %	100 %	281.681.180,00	240.556.412,00	217.410.812,00	77.520,00										281.138.719,00		
1,06.04.2.01	Pembinaan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Guna Guna Pengasuhan & Luar Panti Sosial				277.147.430,00	236.636.992,00	213.496.592,00	-63.650.838,00										277.224.920,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT	
1,06.04.2.01.0001	Pembinaan Pemukiman																			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemukiman Kebutuhan Pemukiman Sosial dengan Standar Gizi Minimal Kecamatan Kabupaten/Kota	200 Orang	200 Orang	49.851.100,00	49.925.000,00	49.925.000,00	-26.100,00	Kota Tawarkan, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)								49.966.420,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT	
1,06.04.2.01.0002	Pembinaan Sandang																			
		Jumlah Orang yang Menerima Bantuan dan Kebutuhan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kecamatan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	7.970.630,00	7.935.000,00	7.935.000,00	-35.630,00	Kota Tawarkan, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)								7.985.250,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT	
1,06.04.2.01.0003	Pembinaan Alat Baru																			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Baru dan Alat Baru Pengerjaan Sosial kebutuhan Kecamatan Kabupaten/Kota	40 Orang	54 Orang	117.500.000,00	90.208.300,00	90.208.300,00	-27.291.700,00	Kota Tawarkan, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)								117.500.000,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT	
1,06.04.2.01.0004	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga																			
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Keluarga Kecamatan Kabupaten/Kota	29 Orang	22 Orang	41.994.840,00	41.953.160,00	23.910.580,00	-18.084.260,00	Kota Tawarkan, Semua Kecamatan, Semua Kad/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)								41.994.840,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2023	PENCAPAIAN CAPAIAN TARGET RENTAN TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PENCAPAIAN RENTAN		PEMBANGKIT DAERAH PENGANGGUP JAWAB
							TARGET 2023		PAU INDIKATIF (Rp)				Berkas/Urut rang (1b-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SEDUJAH	RENTAN 2023	APRIL 2023	RENTAN PERUBAHAN 2023	NASIONAL				DAERAH					
							8	9	10	11	12						13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.06.04.2.02		Manajemen Sosial Pengantar Manajemen Kesejahteraan Sosial Pusat (PUS) Lainnya Badan Keten- gri/PAUDS dan PAUDS di Luar Pusat Sosial							3.913.760.00	3.913.420.00	3.913.420.00	-340.00							3.913.760.00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04.2.02.0001		Pembinaan Layanan Data dan Pengantar																			
			Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengantar Kesejahteraan Kebudayaan Kota				2500 Orang	2500 Orang	3.913.760.00	3.913.420.00	3.913.420.00	-340.00	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI MUSL (DBH)					3.913.760.00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	1.06.04.2.02	PROGRAM PENGUNJUKAN DAN JAMINAN SOSIAL							141.128.540.00	141.128.420.00	113.676.600.00	-24.444.895.00							141.128.540.00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04.2.02		Pengantar Data Fair Masyarakat Calon Dewan Perwakilan Kota							141.128.540.00	141.128.420.00	113.676.600.00	-27.453.040.00							141.128.540.00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04.2.02.0001		Pembinaan Fair Masyarakat Calon Dewan Perwakilan Kota																			
			Jumlah Fair Masyarakat Calon Dewan Perwakilan Kota yang Dapat				7181 Orang	2036 Orang	71.189.580.00	71.189.300.00	59.390.400.00	-11.809.180.00	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI MUSL (DBH)					46.189.585.00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04.2.02.0003		Pembinaan Berbasis Sosial Kesejahteraan Keluarga																			
			Jumlah Keluarga Penerima Mandiri (PKM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga				3447 Keluarga	917 Keluarga	49.980.000.00	49.977.820.00	40.179.600.00	-9.801.400.00	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI MUSL (DBH)					50.300.000.00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.04.2.02.0004		Pembinaan Berbasis Pengantar Ekonomi Masyarakat																			
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengantar Ekonomi Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Kebudayaan Kota				8967 Orang	200 Orang	19.848.960.00	19.848.300.00	14.107.900.00	-5.842.460.00	Kota Ternate, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAKI MUSL (DBH)					9.984.960.00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
3	1.06.04.2.02	PROGRAM PENGUNJUKAN BERBASIS							48.978.800.00	48.938.800.00	48.457.200.00	22.500.00							48.978.800.00		DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1.06.06.2.01	Perdagangan Sosial Kontribusi Berencana dalam dan Sosial Kabupaten/Kota								48.978.000,00	48.939.600,00	48.457.200,00	4.520.800,00						50.000.000,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.06.2.01.0001	Pengadaan Makanan																		
		Jumlah Orang yang Mendapatkan (Penerimaan Isti Hari dalam Masa Tanggapi Darurat (Pangdam))																	
		Keterangan Kabupaten/Kota																	
6.106.87	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN BAKYAM PALEMBANG								124.145.900,00	124.145.730,00	123.895.730,00	4.520.800,00	0,00					124.145.900,00	
1.06.07.2.01	Pembinaan Taman Makanan Pertanian Nasional Kabupaten/Kota								124.145.900,00	124.145.730,00	123.895.730,00	4.520.170,00						124.145.900,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT
1.06.07.2.01.0002	Pembinaan Taman Makanan Pertanian Nasional Kabupaten/Kota																		
		Jumlah Makanan yang Terpenuhi																	
		Pembinaan pada Taman Makanan Pertanian Kabupaten/Kota																	
2	JURUSAN PEMERINTAHAN WALIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH								8.184.547.730,00	3.228.276.120,00	3.178.594.526,00	-1.007.993.330,00						8.184.547.730,00	
2.13	JURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								8.184.547.730,00	3.228.276.120,00	3.178.594.526,00	-1.007.993.330,00						8.184.547.730,00	
1.2.13.44	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Kategori Kabupaten							58.327.340,00	51.087.100,00	58.166.900,00	0,00						58.327.340,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah pendanaan kabupaten							58.327.340,00	51.087.100,00	58.166.900,00	8.839.560,00						58.327.340,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT
2.13.04.2.01.0018	Pembinaan dan Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																		
		Jumlah pendanaan kabupaten							58.327.340,00	51.087.100,00	58.166.900,00	8.839.560,00						58.327.340,00	DINAS SOSIAL DAN PERBERDAYAAN MASYARAKAT

[illegible]

BAB V

PENUTUP

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Tahun 2025 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 sampai bulan Juni 2025 (TW I) yang merupakan bagian dari rangkaian perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kegiatan. Perubahan Sasaran dan Target setelah di Reviu Renstra adalah sesuai Perwali Perbaikan Kinerja sebagai sasaran dan indikator yang digunakan.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan serta sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, penyusunan Perubahan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD.

Tarakan, **Juni** 2025

Kepala Dinas

A R B A I N, SE, M. AP

PEMBINA UTAMA MUDA / IVc

NIP. 19660616 199803 1 006